

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perdagangan manusia melalui pekerjaan ilegal merupakan masalah serius yang sering menjebak pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya di Kamboja, menurut kesimpulan penelitian tersebut. Korban PMI sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya prospek kerja, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya pengetahuan tentang praktik migrasi yang aman. Untuk memanfaatkan korban, organisasi perdagangan manusia menggunakan berbagai taktik, termasuk pencurian identitas, pemalsuan dokumen, pengawasan oleh operator yang tidak berwenang, dan ancaman kekerasan. Perdagangan manusia memiliki dampak yang mendalam pada korban maupun negara asal mereka. Korban mengalami eksploitasi ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, dan penderitaan psikologis dan fisik. Perdagangan manusia dapat mengakibatkan kerugian finansial, merusak reputasi suatu negara di luar negeri, dan meningkatkan risiko keamanan nasional. Upaya komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Pendidikan publik, pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum, dan penerapan hukum yang lebih ketat terhadap lembaga tenaga kerja ilegal adalah contoh pendekatan pencegahan. Prioritas harus diberikan pada perlindungan dan rehabilitasi korban, termasuk penyediaan dukungan psikososial, bantuan hukum, dan layanan kesehatan.

Menangani masalah ini juga membutuhkan kerja sama internasional, terutama melalui perjanjian bilateral dan multilateral. Diharapkan bahwa perdagangan manusia dapat dicegah dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dapat lebih terjamin melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat. Indonesia memiliki peran diplomatik yang krusial dan kompleks dalam menangani kasus perdagangan manusia di Kamboja. Politik bilateral, legislasi, perlindungan warga negara, rehabilitasi korban, dan pembangunan kapasitas kelembagaan semuanya termasuk dalam diplomasi ini. Kolaborasi bilateral dan multilateral, bersama dengan keterlibatan aktif dalam jaringan internasional seperti Interpol, adalah cara pelaksanaannya.

Pemerintah Indonesia telah berhasil memulangkan beberapa korban dari luar negeri dan telah menerapkan berbagai langkah untuk memerangi insiden perdagangan manusia (TPPO). Selain itu, Asosiasi Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki berbagai layanan resmi yang telah disediakan pemerintah untuk masyarakat. Layanan ini mudah diakses melalui situs web resmi organisasi tersebut. Langkah-langkah pencegahan yang intensif juga telah diterapkan, seperti pembentukan forum masyarakat, khususnya untuk mahasiswa, dan pengesahan undang-undang baru yang secara eksplisit membahas masalah TIP. Selain itu, banyak korban mengalami stres psikologis, yang membuat mereka tidak dapat berperan aktif dalam prosedur penyelesaian kasus. Bantuan pemerintah masih dibutuhkan oleh banyak pihak yang terdampak. Dengan demikian, sampai semua pelaku domestik dan asing tertangkap, kasus TIP akan terus berlanjut.

Secara keseluruhan, strategi diplomatik Indonesia telah menghasilkan hasil yang nyata dalam hal memperkuat perlindungan hukum, mempercepat repatriasi korban, menurunkan jumlah kasus perdagangan manusia, dan menegaskan kembali dedikasi negara untuk menjadikan nilai-nilai kemanusiaan dan keselamatan warga negara sebagai landasan kebijakan luar negerinya. Tindakan-tindakan ini menunjukkan pendekatan diplomatik modern yang adaptif, sangat menghargai kolaborasi, dan memanfaatkan teknologi. Akibatnya, Indonesia semakin bertekad untuk secara agresif mempromosikan cita-cita keamanan manusia di tingkat regional dan internasional.

Studi ini menunjukkan bahwa meskipun Kamboja telah meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional untuk memerangi perdagangan manusia, implementasi instrumen-instrumen tersebut di tingkat nasional masih sangat minim. Hambatan struktural yang rendah, sedikitnya peraturan turunan, dan masyarakat yang kurang mendukung korban merupakan tantangan utama. Strategi hukum saat ini seringkali bersifat legalistik dan kurang peka terhadap kompleksitas sosial dan kebutuhan akan rehabilitasi korban yang menyeluruh. Studi ini inovatif karena menyoroti perlunya menyelaraskan legislasi nasional dengan standar internasional dan perlunya memperkuat pendekatan yang berpusat pada korban sebagai kerangka kerja fundamental untuk perubahan hukum dan kebijakan. Dengan menyediakan

kerangka kerja yang lebih fleksibel dan integratif untuk mengatasi dinamika penegakan hukum multinasional, temuan ini memajukan bidang penelitian hukum.

Untuk memenuhi persyaratan perlindungan hak asasi manusia internasional, Kamboja harus mendukung reformasi hukum yang memprioritaskan mekanisme nyata untuk perlindungan korban, rehabilitasi, dan pemberdayaan di samping mengatur hukuman. Upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah perdagangan manusia terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja telah membuat kemajuan besar, menurut temuan penelitian dan debat. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk mengatasi masalah ini dengan mengambil tindakan termasuk membentuk Gugus Tugas untuk Memerangi Perdagangan Manusia dan mengembangkan kerja sama bilateral dengan Kamboja.

